

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adjie, Habib , *Hukum Notaris Indonesia : Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung : Refika Aditama, 2008),
- , Habib *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- , Habib *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- , Habib, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Anand, Ghansham *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017
- Anshori, Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009
- Belifante, A.D., dan Boerhanoeddin Soetan Batoeah, *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara*, Bina Cipta, Jakarta, 1983
- Budiono, Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 2007
- Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Cet. I, Pustaka Harapan, Jakarta, 1993
- Koehn, Daryl, *Landasan Etika Profesi*, Yogyakarta: Kanisius, Yogyakarta, 2000
- Koesoemawati, Ira, dan Yunirman Rijan, *Mengenal Profesi Notaris, Memahami Praktik Kenotariatan, Ragam Dokumen Penting yang diurus Notaris, Tips agar tidak tertipu Notaris*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- Muhammad, Abdulkadir *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Nasir, Muhammad, *Hukum Acara Perdata*, Djambatan, Jakarta, 2005
- Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta, 2003
- Notodisoerjo, R. Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1993
- Notohamidjojo, O., *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011

- Phillips, Estelle, *Researching and Writing in Law*, Lawbook, Sidney, 2002
- Prajitno, A.A. Andi, *Pengetahuan Praktis : Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia*, Selaras, Malang, 2012
- Saputro, Anke Dwi, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008
- Sesung, Rusdianto, dkk., *Hukum Dan Politik Hukum Jabatan Notaris*, R.A.De.Rozarie, Surabaya, 2017
- Simanjuntak, P.N.H., *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Cet 3, Djambatan, Jakarta, 2007
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011
- Soekanto, Soerjono, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1983
- Sulihandari, Hartanti & Nisya Rifiani, *Prinsip – Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta Timur, 2013
- Tedjosaputro, Liliana, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1995
- Tobing, G. H. S. Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983
- Widyadharma, Ignatius Ridwan, *Etika Profesi Hukum Dan Keperanannya*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2001

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491
- Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris

C. Karya Ilmiah

- Astuti, Dessy Dwi, "Rangkap Jabatan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", Tesis, Fakultas Hukum, Program Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, 2010
- Hadjon, Philipus M., "Penegakan Hukum Administrasi dalam Kaitannya dengan Ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Yuridika* Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1996
- Irfandy, Aang, "Analisis Yuridis terhadap Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Tidak Hormat Notaris Akibat Dinyatakan Pailit", Tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2007
- Muchtar, Rozy Alfian, "Kewenangan Pemberhentian Sementara Atau Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Terhadap Notaris", Tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2012
- Muzakkar, T., "Perbandingan Peranan Dewan Kehormatan dengan Majelis Pengawas Notaris dalam Melakukan Pengawasan Setelah Keluarnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004", Tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009
- S. Rusdianto, "Prinsip Kesatuan Hukum Nasional Dalam Pembentukan Produk Hukum Pemerintah Daerah Otonomi Khusus atau Sementara", Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2016
- Sapriana, Anita, "Analisis Yuridis Terhadap Notaris Yang Diberhentikan Sementara Dari Jabatannya Karena Sedang Menjalani Masa Penahanan", Tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2016
- Suhardjono, Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum, *Varia Peradilan*, Nomor 123, 1995



LAPORAN PERKEMBANGAN SIDANG MPW PENGADUAN MASYARAKAT 2018

NO.	ASAL SURAT	POKOK PERKARA	KEPUTUSAN MA
1.	MPD MOJOKERTO Surat Nomor : UM.MPDNMOJOKERTO.10.17-42 tanggal : 28 Oktober 2017 Perkara : Pelapor : L G Terlapor : Notaris M Penetapan Majelis : M.20.MPWN.Prov.Jatim.11.17 Tanggal : 1 November 2017 DITERIMA SEKRETARIAT : 1-11-2017	TERLAPOR diduga tidak membacakan isi akta Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 19 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 20 tanggal 11 Pebruari 2004, sehingga PELAPOR tidak mengetahui isi dari perjanjian yang ia tandatangani	Nomor : 05/ Pts/MPWN.Prov Timur/XI/2018 Tanggal 28 Nopember 2018 Amar : Menolak laporan Pelapor s
2.	MPD MOJOKERTO Surat Nomor : UM.MPDNMOJOKERTO.03.18-21 Tanggal : 19 Maret 2018 Perkara : Pelapor : D Terlapor : Notaris G Y Penetapan Majelis : M.01.MPWN.Prov.Jatim.04.18 Tanggal : 10 April 2018 DITERIMA SEKRETARIAT : 6-4-2018	PELAPOR merasa tidak pernah membuat Akta Jual Beli tertanggal 20 Desember 2008, Nomor 1302/2008 antara PELAPOR selaku penjual dengan Madun Basori alias Ahmadun Bashori selaku pembeli	Nomor : 02/ Pts/Mj.PWN.Pro Timur/X/2018 Tanggal : 10 Oktober 2018 Amar : Permohonan Pelapor Tidal Karena terkait jabatan PPA
3.	MPD PASURUAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN Nomor: 07.BAP/MPDN Kab. Pasuruan/III/2017 Tanggal 31 Maret 2017 Perkara : Pelapor : F P Terlapor : Notaris Y P Penetapan Majelis : M.16.MPWN.Prov.Jatim.10.17 Tanggal : 20 Oktober 2017	PELAPOR menyatakan tidak pernah membuat dan hadir dalam penandatanganan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 10 Tanggal 22 Juni 2006 yang dibuat oleh TERLAPOR	Nomor :06/Pts/MPWN.Provir Timur/XI/2018 Tanggal (rencana dibacakan Desember 2018) Amar : Menolak laporan Pelapor s
4.	MPD MOJOKERTO Surat Nomor : UM.MPDNMOJOKERTO.03.18-18 Tanggal : 19 Maret 2018 Perkara : Pelapor : A Terlapor : Notaris R D Penetapan Majelis :	PELAPOR merasa tidak pernah tandatangan Akta Nomor 04/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang jual beli tanah objek sengketa antara Abdullah sebagai Penjual dengan Agus Mulyana sebagai Pembeli	Nomor : 01/ Pts/Mj.PWN.Pro Timur/X/2018 Tanggal 10 Oktober 2018 Amar : Permohonan Pelapor Tidal Karena terkait jabatan PPA

	M.02.MPWN.Prov.Jatim.04.18 Tanggal : 10 April 2018 DITERIMA SEKRETARIAT : 9-4-2018		
5.	MPD GRESIK Surat Nomor : UM.MPDN GSK.08.17-49 Tanggal : 25 Agustus 2017 Perkara : Pelapor : R H Terlapor : Notaris A P Penetapan Majelis : M.18.MPWN.Prov.Jatim.10.17 Tanggal : 25 Agustus 2017 DITERIMA SEKRETARIAT : 30-8 -2017	TERLAPOR diduga membuat suatu utang piutang dengan jaminan menjadi jual beli, sehingga objek jaminan beralik nama menjadi nama pihak ketiga	Proses perdamaian antar pihak
6.	MPD MADIUN Surat Nomor : UM.MPDN -MDN.08.2016.04 Tanggal : 15 Agustus 2016 Perkara : Pelapor : PT.BANK M Terlapor : Notaris A A Penetapan Majelis : M.07.MPWN.Prov.Jatim.10.17 Tanggal : 20 Oktober 2017 DITERIMA SEKRETARIAT : 3-11 -2016	TERLAPOR diduga tidak amanah dan tidak menjaga kepentingan pihak-pihak dalam menjalankan jabatannya dengan menyerahkan secara sepihak kepada PT. HMP sebanyak 30 (tiga puluh) sertifikat yang seharusnya menjadi agunan pembiayaan PT. HMP di BMI Cabang Kediri	Nomor : 04/ Pts/MPWN.Prov Timur/XI/2018 Tanggal : 7 Nopember 2018 Amar : mengusulkan kepada Majelis Notaris untuk memberikan sanksi PEMBERHENTIAN SEMEN' BULAN
7.	MPD SURABAYA Surat Nomor : UM.MPDN Kota Surabaya.08.17.17 Tanggal : 23 Agustus 2017 Perkara : Pelapor : W K Terlapor : Notaris D C Penetapan Majelis : M.06.MPWN.Prov.Jatim.07.18 Tanggal : 30 Juli 2018 DITERIMA SEKRETARIAT : 31 Juli 2018	TERLAPOR diduga memihak Pembeli dengan ikut memotong/menyetujui pemotongan denda secara sepihak dan menindaklanjuti Akta Ikatan Jual Beli menjadi Akta Jual Beli tanpa mengindahkan persyaratan pelunasan pembayaran jual beli sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan yang mengatur jual beli hak atas tanah	Nomor : 03/ Pts/Mj.PWN.Pro Timur/IX/2018 Tanggal : 24 Oktober 2018 Amar : mengusulkan kepada Majelis Notaris untuk memberikan sanksi PEMBERHENTIAN SEMEN' BULAN
8.	MPD MALANG Surat Nomor : 1059-Um-MPD Mlg-III-2018 Tanggal : 18 Juli 2018 Perkara : Pelapor : SN Terlapor : Notaris BB Penetapan Majelis : M.03.MPWN.Prov.Jatim.07.18	TERLAPOR diduga memalsukan surat-surat terkait pembuatan perjanjian pengikatan jual beli atas objek yang berada di Kab Pamekasan	Proses sidang

	Tanggal : 30 Juli 2018 DITERIMA SEKRETARIAT : 20 Juli 2018		
9.	MPD MOJOKERTO Surat Nomor : UM.MPDNMOJOKERTO.07.18-139 Tanggal : 26 Juli 2018 Perkara : Pelapor : NI Terlapor : Notaris M. A F. Penetapan Majelis : M.04.MPWN.Prov.Jatim.07.18 Tanggal : 30 Juli 2018 DITERIMA SEKRETARIAT : 30-7-2018	TERLAPOR diduga tidak mengembalikan sejumlah keweajiban yang seharusnya diberikan kepada PELAPOR	Proses Mediasi dan penyele: TERLAPOR
10.	MPD MOJOKERTO Surat Nomor : UM.MPDNMOJOKERTO.07.18-139 Tanggal : 26 Juli 2018 Perkara : Pelapor : DS Terlapor : Notaris HS Penetapan Majelis : M.05.MPWN.Prov.Jatim.07.18 Tanggal : 30 Juli 2018 DITERIMA SEKRETARIAT : 30-7-2018	TERLAPOR diduga tidak amanah dengan tidak menyelesaikan sejumlah pekerjaan yang telah disepakati dalam perjanjian dengan pihak Bank	Proses Mediasi dan penyele: TERLAPOR